

PENGARUH NILAI-NILAI SOSIAL YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Oleh :

BERNADUS SUKISMO

PRAKATA

Penelitian ini ingin mengetahui korelasi beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, antara lain (1) ketaatan beragama, (2) pimpinan masyarakat baik formal maupun non formal dan (3) aktifitas penyuluhan perpajakan. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan suatu rekomendasi kepada Pemerintah, jadi mempunyai kegunaan yang bersifat praktis.

Disamping itu dari hasil penelitian inipun diharapkan dapat dikembangkan teori-teori baru, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan kadar kesadaran masyarakat. Proposisi-proposisi yang diangkat didalam penelitian ini untuk mendasari teori-teori yang akan digunakan adalah (1) Pengembangan nilai sosial untuk mengarah kepada kepatuhan dalam pembayaran pajak; (2) Ketaatan beragama akan meningkatkan rasa keterbukaan serta kejujuran masyarakat, hal demikian akan memperlancar penerapan sistem perpajakan yang baru; (3) Tingkat kemanfaatan yang dinikmati secara pribadi, akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak. Jadi penelitian ini mempunyai kegunaan yang bersifat teoritis.

Biaya penelitian ini diperoleh dari dana SPP UGM Tahun Anggaran 1986/1987. Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan, mulai bulan Nopember 1986 sampai dengan bulan Juni 1987. Hasil penelitian ini dihaturkan kepada Fakultas Hukum UGM dan Universitas Gadjah Mada.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada bapak Muchsan yang telah berkenan memberikan bimbingan, dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan bagi semua pihak.

Yogyakarta, Juni 1987

B. Sukismo

Pemimpin proyek/Peneliti

INTISARI

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimanakah hubungan antara nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak? (2) Adakah pengaruh pimpinan non formal dalam pembentukan nilai sosial? (3) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terbentuknya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak? (4) Usaha-usaha apakah yang dapat ditempuh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam pembayaran pajak?

Cara penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini mengutamakan data empiris dan dikumpulkan dengan metoda wawancara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ditetapkan sebagai bahan penelitian adalah 300 orang wajib pajak yang tersebar di 20 desa di wilayah Kabupaten Dati II Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Bantul, Sleman, dan Kodya Dati II Surakarta dan Yogyakarta, sebagai responden secara *random sample*. Data empiris (lapangan) ini dianalisa secara statistik, kemudian dicari korelasinya. Pendekatan data secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah :

- (1) Terdapat korelasi antara nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dengan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak;
- (2) Peranan pimpinan non formal dalam pembentukan nilai-nilai sosial cukup besar;
- (3) Faktor-faktor sanksi hukuman, agama, tauladan dari pimpinan, cukup berpengaruh terhadap terbentuknya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
- (4) Pemerintah telah melakukan aktivitas penyuluhan perpajakan meskipun masih terbatas;
- (5) Terdapat korelasi antara agama dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak;
- (6) Pajak bermanfaat bagi masyarakat;
- (7) Partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak meningkat.

BAB I PENGANTAR

a. Latar Belakang Permasalahan

Dengan berlakunya Undang-undang No. 6 tahun 1983, telah terjadi perubahan dalam sistem perpajakan nasional, karena masalah benda/harta maupun penghasilan kena pajak, baik kualitas maupun kuantitasnya, dipercayakan sepenuhnya kepada si wajib pajak untuk menghitungnya sendiri. Kebijakan yang demikian akan dapat berhasil dengan baik apabila diimbangi oleh sikap keterbukaan serta kejujuran dari si wajib pajak. Kadar keterbukaan dan kejujuran masyarakat akan menentukan kadar kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pembentukan kadar kepatuhan ini akan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat wajib pajak. Nilai-nilai sosial ini dapat digolongkan dalam 3 macam yakni (1) yang menunjang kepatuhan dalam pembayaran pajak, (2) yang menghambat dalam pembayaran pajak dan (3) yang bersifat netral.

Dengan demikian permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1). Bagaimanakah hubungan antara nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak?; 2). Adakah pengaruh pimpinan non formal dalam pembentukan nilai-nilai sosial; 3). Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terbentuknya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak?; 4). Usaha-usaha apakah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam pembayaran pajak?

b. Tinjauan Pustaka

Teori-teori yang diajukan adalah sebagai berikut :

- 1). Corak dan bentuk nilai-nilai sosial sangat tergantung kepada teladan yang diberikan oleh pimpinan masyarakat;
- 2). Tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tergantung pada kadar keterbukaan dan kejujuran anggota masyarakat;
- 3). Bobot partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak, akan ditentukan oleh besar kecilnya manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kerangka teori yang digunakan untuk memperkuat rumusan teori yang pertama adalah *teori paternalisme* yang dikemukakan oleh Kuntjaraningrat (Kuntjaraningrat, 1974 : 22). Menurut teori ini bahwa didalam sistem kehidupan masyarakat, terdapat suatu pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan,

merupakan suatu hal yang benar, sehingga patut untuk diteladani. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya paternalisme tersebut adalah (1) mental masyarakat yang terlalu lama hidup dalam penjajahan serta (2) sikap dan pola peri laku masyarakat yang selalu menghindari konflik.

Teori semacam ini dikemukakan pula oleh Daniel Lev (Daniel Lev, 1981 : 12), yang mengemukakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa terjadi apa yang disebut *vertikalisme*. Menurut teori vertikalisme ini bahwa rasa patuh dan taat kepada pimpinan bagi suku Jawa menunjukkan frekuensi yang tinggi. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa sumber teladan bagi mereka, adalah pimpinan mereka sendiri.

Adapun kerangka teori yang digunakan untuk memperkuat rumusan teori yang kedua adalah *teori komunikasi sosial* (social communication) yang dikemukakan oleh Leopold Pospisil (Leopold Pospisil, 1974 : 71). Menurut teori ini bahwa masyarakat yang tidak mengenai individualisme dalam kehidupannya, komunikasi lebih mudah dilakukan, yang rendensinya penyerapan terhadap kehendak masyarakat lebih tinggi. Didalam masyarakat yang demikian, rasa kepatuhan terhadap peraturan yang diinstruksikan dari atas lebih tinggi tingkatnya.

Adapun kerangka teori yang digunakan untuk memperkuat rumusan teori yang ketiga, adalah teori yang diajukan oleh Prof. DR. Selo Sumardjan (Selo Sumardjan, 1976 : 71). Beliau mengemukakan bahwa kehidupan manusia terdiri dari dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Dua kepentingan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan selalu ingin dipenuhi kedua-duanya. Oleh karena itu keikut sertaannya dalam kehidupan sosial, manusia pasti akan membawa kepentingan pribadinya. Semakin tinggi kepentingan pribadinya terpenuhi, akan semakin tinggi tingkat keikut sertaan mereka dalam kehidupan sosial.

c. Hipotesis

Mayor : Ada hubungan yang kuat antara nilai-nilai sosial dengan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

- Minor :
- 1). Semakin serasi nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dengan tujuan pembangunan nasional, semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak.
 - 2). Semakin nyata kemanfaatan pembayaran pajak bagi kehidupan masyarakat, semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk memenuhinya.

BAB II CARA PENELITIAN

Penelitian ini lebih mengutamakan data lapangan (empiris) dan dikumpulkan dengan metoda wawancara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ditetapkan sebagai bahan penelitian adalah 300 orang wajib pajak yang tersebar di 20 desa di wilayah Kabupaten Dati II Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Bantul, Sleman, dan Kodya Dati II Surakarta, dan Yogyakarta, sebagai responden secara *random sample*. Data lapangan (empiris) ini dianalisa secara statistik, kemudian dicari korelasinya untuk menarik kesimpulan. Pendekatan data secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Lapangan.

a. Tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hukum Perpajakan

Sumber : a sampai dengan d data primer penelitian.

Membayar pajak adalah wajib bagi setiap insan warga negara. Tidak seorngpun warga negara yang terlepas dari beban membayar pajak. Hal ini nampak bahwa seluruh responden menyatakan pernah membayar pajak (100%). Mayoritas masyarakat membayar pajak bervariasi antara 1 sampai dengan 6 macam pajak (72%), namun mereka pada umumnya kurang faham mengenai hakekat perpajakan, dari siapa dan untuk apa pajak itu. Mereka menganggap bahwa pajak identik dengan perintah pihak penguasa (62%). Bobot pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum perpajakan sangat dipengaruhi oleh keaktifan dan kreatifitas mereka sendiri (82%). Pemerintah dalam hal ini, aparat perpajakan pernah melaksanakan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat, meskipun belum merata (94%). Frekuensi penyuluhan secara aktif masih tergolong sangat minim (14%). Pada azasnya mayoritas masyarakat antusias untuk mengetahui/memahami tentang isi dari pada peraturan hukum perpajakan (74%), namun kenyataannya pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum perpajakan masih relatif kurang (94%). Hal ini terjadi karena pada umumnya masyarakat merasa enggan untuk bertanya kepada para petugas pajak. Sikap

pasif ini terjadi karena adanya nilai sosial bagi masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa, yaitu sikap "nrimo" atau menerima apa adanya (78%). Secara umum kesadaran hukum masyarakat terhadap perpajakan menunjukkan peningkatan yang menggembirakan yaitu mayoritas masyarakat ingin mengetahui kewajiban-kewajibannya di bidang perpajakan (44%), sanksi-sanksi yang mungkin dijatuhkan apabila terjadi kelalaian atau kesengajaan dalam hal kelambatan atau tidak membayar pajak (26%) dan juga mereka ingin mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah perpajakan (24%). Mayoritas masyarakat merasa bahwa bobot peraturan hukum perpajakan yang ada dewasa ini masih kurang sempurna (64%). Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi penguasa dan para wakil rakyat yang duduk dalam forum Badan Legislatif.

b. Tentang Peranan Pemuka Masyarakat Dalam Peningkatan Kepatuhan Anggota Masyarakat Terhadap Peraturan Perpajakan

Peranan Kepala Desa (termasuk Kepala Kelurahan) selaku pimpinan formal didalam penyebaran informasi perpajakan (42%) cukup berimbang dibandingkan dengan peranan para Tetua Masyarakat selaku pimpinan non formal (30%). Mayoritas masyarakat cukup loyal kepada para tetua masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa para tetua masyarakat adalah para sumber untuk berbagai hal, termasuk dalam bidang perpajakan.

Hal ini nampak meskipun langkah yang dilakukan oleh para tetua masyarakat bersifat himbauan (82%), namun masyarakat cenderung untuk mengikutinya. Tingkat kejelasan mengenai informasi perpajakan yang disampaikan pimpinan formal relatif seimbang (32%) dengan penjelasan yang diberikan oleh pimpinan non formal (36%). Tingkat kesadaran para pimpinan non formal dalam hal ketertiban membayar pajak relatif tinggi (54%). Hal ini penting artinya untuk menggugah dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak, mengingat kedudukan para tetua masyarakat sebagai panutan yang senantiasa akan diikuti para warga masyarakatnya. Kedudukan sebagai panutan masyarakat ini erat hubungannya dengan nilai sosial yang ada dalam masyarakat bahwa seorang pemimpin itu berpola peri laku : Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani (didepan memberi contoh, ditengah memberikan motivasi untuk berkreasi dan berkarya, sedangkan dibelakang senantiasa memberikan dukungan secara positif).

Hubungan antara masyarakat dengan para pimpinan non formal relatif erat dan cukup akrab, nampak bahwa banyak anggota masyarakat yang mohon penjelasan tentang perpajakan kepada para tetua masyarakat (68%). Mengenai pelaksanaan pembayaran pajak, mayoritas anggota masyarakat melaksanakan

sendiri pembayaran pajaknya (70%). Mereka sudah mempunyai rasa kemandirian yang sudah cukup baik dan merasa enggan apabila menjadi beban pihak lain. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat sudah lebih tumbuh dan berkembang. Dari segi lain, niat para tetua masyarakat untuk membantu anggota masyarakat dalam bidang perpajakan baik diminta atau tidak, cukup berkembang dengan baik (68%). Sikap yang baik dari para tetua masyarakat ini diterima dan diakui manfaatnya oleh masyarakat (74%). Hubungan personal antara tetua masyarakat dengan masyarakatnya dalam berbagai hal termasuk dalam bidang perpajakan nampak cukup akrab, hal ini terlihat pada frekuensi pertemuan dan kunjungan para tetua masyarakat kepada para anggota masyarakat, cukup sering dilakukan (82%).

c. Tentang Kepatuhan Beragama Dalam Kaitannya Dengan Pembayaran Pajak

Peningkatan kesadaran perpajakan melalui jalur agama, merupakan faktor yang layak untuk dipertimbangkan, karena mayoritas masyarakat menyatakan bahwa agama berfungsi sebagai petunjuk hidup dan pegangan hidup bagi setiap insan didalam bermasyarakat (72%). Masyarakat Indonesia bersifat religius, karena mayoritas masyarakat sangat meyakini agama yang dianutnya (94%). Adanya doktrin membayar pajak cukup dikenal oleh sebagian besar masyarakat di dalam ajaran agama yang dianutnya (94%).

Bentuk pengenalan doktrin tersebut didominasi oleh bentuk penafsiran (58%). Para pemuka agama yang dalam hal ini juga berperan sebagai pimpinan non formal dalam kehidupan bermasyarakat, mengungkapkan adanya dan makna doktrin tersebut, pada setiap kesempatan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa peranan para pemuka agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak cukup besar (92%). Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak nampak mulai meningkat, karena mereka beranggapan bahwa tidak membayar pajak, baik disengaja atau tidak adalah bersalah kepada negara (62%). Agama mempunyai posisi yang cukup baik untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini nampak bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan, membayar pajak merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (64%). Sedangkan golongan masyarakat lainnya menyatakan bahwa membayar pajak merupakan perbuatan yang dianjurkan (44%). Peranan pemuka agama adalah ganda yaitu disamping sebagai nara sumber dalam bidang agama juga sebagai nara sumber dalam berbagai hal termasuk dalam bidang perpajakan. Nampak bahwa banyak anggota masyarakat yang bertanya kepada para pemuka agama tentang perpajakan (68%). Penjelasan tentang perpajakan yang diberikan oleh para pemuka

agama cukup memuaskan (54%). Para pemuka agama mempunyai peranan yang besar didalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada masyarakat, banyak dilakukan dengan mengutip pada ayat-ayat dan atau ketentuan dalam kitab suci yang berkaitan dengan masalah perpajakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lebih yakinnya masyarakat terhadap doktrin untuk membayar pajak yang dikenal dalam ajaran agama, maka faktor ini akan mempertinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (62%). Pengawasan para pemuka agama terhadap kelalaian untuk membayar pajak terasa belum memadai, karena para pemuka agama jarang memberikan teguran terhadap pihak yang lalai membayar pajak tersebut. Hal ini mungkin terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh para pemuka agama adalah lebih bersifat himbauan (62%).

d. Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perpajakan

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, menunjukkan tingkat kemajuan yang baik, karena sebagian besar anggota masyarakat relatif tepat didalam membayar pajak (58%). Adapun sering terjadi ketidak tepatan dalam pembayaran pajak itu disebabkan faktor lain, yang pada umumnya disebabkan karena kesulitan dalam bidang keuangan (42%) dan juga prosedur yang berbelit-belit (34%). Kemandirian untuk melaksanakan pembayaran pajak dengan dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan (88%).

Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa sanksi yang pernah dijatuhkan terhadap dirinya, meskipun frekuensinya termasuk jarang, tetapi dirasakan berat (84%). Pada umumnya alasan yang mereka kemukakan sehubungan dengan dijatuhinya suatu sanksi, karena kesulitan di bidang keuangan dan prosedur yang berbelit-belit, sehingga terjadi kelambatan pembayaran pajak dan lain sebagainya (72%). Terhadap beban pajak yang ditetapkan terhadap para wajib pajak suatu ketika dirasakan cukup berat, karena sering besarnya ketetapan pajak tersebut diluar jangkauan mereka untuk membayarnya, sedangkan upaya hukumnya kurang tersedia (80%). Faktor yang turut mendorong keberhasilan untuk membayar pajak pada umumnya masih diwarnai oleh kesadaran hukum yang semu, karena mereka semata-mata hanya takut terhadap sanksi hukuman yang diancamkan dan dijatuhkan (58%), meskipun kesadaran hukum yang murni juga sudah ada tetapi tingkatnya masih rendah (26%). Namun disisi lain ada faktor yang menggembirakan dan senantiasa dapat mendorong meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak, karena sebagian besar masyarakat mengakui dan merasakan bahwa kegunaan pajak dapat mereka nikmati, meskipun secara tidak langsung, tendensinya bahwa partisipasi masya-

rakat akan lebih meningkat lagi dalam hal perpajakan (64%). Faktor lainnya yang mendorong meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak, yaitu setelah masyarakat mendapat penyuluhan dan penjelasan tentang perpajakan baik lewat jalur formal maupun non formal, akhirnya masyarakat memahami tentang penggunaan uang pajak oleh negara, meskipun tingkat pemahaman mereka tersebut bervariasi (88%). Penetapan beban pajak kepada para wajib pajak, nampak belum mencerminkan pemerataan dan keadilan, karena sebagian terbesar masyarakat menyatakan bahwa beban pajak yang ditetapkan terhadap dirinya dirasa belum tepat (54%), tetapi sebagian kecil lainnya merasa sudah tepat (30%).

e. Frekuensi Pendidikan

Sumber : data primer penelitian.

Tingkat pendidikan responden : TB (38); SD (70); SLTP (68); SLTA (89); AK/SM (25); Sjn (10).

Analisis :

- 1). Rata-rata (\bar{x}) penyebaran responden berdasarkan pendidikan untuk setiap lokasi penelitian sebagai berikut : TB (5,43); SD (10,00); SLTP (9,71); SLTA (12,71); AK/SM (3,57); Sjn (1,43).
- 2). Perbandingan untuk setiap tingkat pendidikan adalah 1 : 2 : 2 : 2,5 : 0,75 : 0,20.
- 3). Pengelompokan terbesar ada pada tingkat SD dan SLTA (\bar{x}) 10,00 dan (\bar{x}) 12,75).

f. Frekuensi Agama Yang Dipeluk

Sumber : data primer penelitian.

Jumlah pemeluk agama Islam (168); Katholik (83); Kristen (32); Budha (11); Hindu (6).

Analisis :

- 1). Jumlah rata-rata (\bar{x}) pemeluk untuk setiap agama bagi setiap lokasi penelitian sebagai berikut : Islam (24); Katholik (16,17); Kristen (4,57); Budha (1,57); Hindu (0,86).
- 2). Perbandingan dari pemeluk masing-masing agama secara berurutan adalah 1 : 2 : 5,5 : 20 : 30 (Hindu : Budha : Kristen : Katholik : Islam).

g. Frekuensi Jumlah Pajak

Sumber : data penelitian sekunder (terbatas sampai pemasukan pajak tahun 1986).

Jumlah pajak per tahun dalam ribuan rupiah : 1983 (3.641,25); 1984 (4.159,15); 1985 (5.864,16); 1986 (9.220,55).

Analisis :

- 1). Jumlah pajak selama 4 tahun berturut-turut (1983 s/d 1986) dalam ribuan rupiah terkecil (2.865,85) dan terbesar (4.171,90).
- 2). Rata-rata (\bar{x}) pajak untuk setiap tahun dalam ribuan rupiah adalah 1983 (505,91); 1984 (594,16); 1985 (837,74); 1986 (1.317,22).
- 3). Setiap tahun menunjukkan angka kenaikan dengan perbandingan 1 : 1,05 : 1,75 : 2,65.

h. Korelasi Pendidikan dan Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB)

Sumber : data penelitian sekunder.

Analisis :

- 1). Perbandingan jumlah pajak dilihat dari segi wajib pajak (WP) dalam ribuan rupiah : Klaten 42 WP (4.171,90); Sukoharjo 47 WP (2.606,10); Wonogiri 25 WP (2.381,41); Surakarta 50 WP (4.123,40); Bantul 22 WP (2.865,85); Sleman 57 WP (3.177,05); Yogyakarta 57 WP (3.459,50).
- 2). Dengan tolok ukur pendidikan mulai peringkat SLTA keatas, maka hierarki angka pemasukan pajak dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut : Klaten 21 WP (4.171,90); Sukoharjo 17 WP (2.606,10); Wonogiri 7 WP (2.381,41); Surakarta 24 WP (4.123,40); Bantul 7 WP (2.865,85); Sleman 22 WP (3.177,05); Yogyakarta 26 WP (3.459,50).

i. Korelasi Antara Agama Dan Frekuensi Pembayaran Pajak (PBB)

Sumber : data primer dan sekunder penelitian.

Analisis :

- 1). Perbandingan jumlah pemeluk agama dengan pemasukan jumlah pajak menunjukkan korelasi yang negatif;
- 2). Korelasi antara peranan pimpinan non formal (khususnya dalam bidang keagamaan) dengan peningkatan kesadaran pembayaran pajak (PBB) tetap ada, meskipun menunjukkan angka yang kecil.
- 3). Adanya variabel lain (luas tanah dan bangunan serta kualitas tanah dan bangunan), maka variabel agama kurang menunjukkan peranannya.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Rangkuman Pokok-Pokok Bahasan

- a). Adanya antusias masyarakat ingin mengetahui seluk beluk perpajakan, hal ini merupakan awal tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dibidang perpajakan.
- b). Adanya nilai sosial yaitu sikap "nrimo" (menyerah apa adanya) menyebabkan timbulnya sikap pasif masyarakat, yang tendesinya menghambat peningkatan pengetahuan masyarakat, khususnya dalam bidang perpajakan.
- c). Frekuensi aktifitas penyuluhan perpajakan yang masih sangat minim itu perlu ditingkatkan dan digalakkan lagi.
- d). Peranan para pimpinan masyarakat baik formal maupun non formal adalah cukup baik dan strategis untuk membawakan pesan-pesan pembangunan termasuk dalam bidang perpajakan.
- e). Adanya nilai sosial yaitu sikap pimpinan yang berperan sebagai panutan, lebih jelas dalam ungkapan "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani", dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.
- f). Mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah tergolong religius, maka nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan yang terkandung dalam ajaran agama, senantiasa akan tertanam pula pada hati sanubari setiap insan warga negara yang sekaligus pemeluk agama yang bersangkutan, maka peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak melalui jalur agama adalah cukup tepat.
- g). Dengan dikenalnya doktrin membayar pajak dalam ajaran agama, terlebih pengenalan tersebut dengan cara mengutip dari ayat-ayat atau ketentuan-ketentuan dari Kitab Suci keagamaan, jelas hal ini menambah kuatnya keyakinan masyarakat, yang tendensinya dapat mendorong untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak.
- h). Nilai-nilai keagamaan besar andilnya dalam mendasari dan membentuk nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, yang tendensinya dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.
- i). Penyuluhan perpajakan yang sudah ada meskipun dalam kondisi sangat minim perlu ditingkatkan dan digalakkan. Hal ini penting untuk meningkatkan bobot pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, dimana pengetahuan merupakan unsur utama lahirnya kesadaran, termasuk kesadaran untuk membayar pajak.

- j). Setelah diadakan penyuluhan dan penjelasan tentang perpajakan, mayoritas masyarakat menyatakan dan mengakui bahwa mereka bisa memahami penggunaan uang pajak oleh negara. Selain itu mereka juga dapat merasakan manfaat dari pemasukan pajak, maka hal ini jelas akan mendorong partisipasi masyarakat untuk membayar pajak.
- k). Beban pajak yang ditetapkan kepada si wajib pajak dirasa masih relatif berat dan belum merata. Hal ini merupakan tantangan bagi penguasa dan para wakil rakyat di forum Badan Legislatif.
- l). Pendidikan para responden merata, tertinggi adalah SD dan SLTA.
- m). Pemeluk agama Islam menduduki peringkat terbesar, sedangkan jumlah sampel para wajib pajak terbatas pada pajak bumi dan bangunan (P.B.B.).
- n). Ada peningkatan kesadaran pembayaran pajak untuk setiap tahunnya, jumlah tertinggi terjadi pada tahun 1986.
- o). Korelasi antara pendidikan dengan jumlah pajak yang masuk relatif kecil, tetapi korelasi antara pendidikan dengan kesadaran hukum untuk membayar pajak tetap ada. Variabel luas tanah dan kualitas tanah dan bangunan sangat dominan dalam menentukan besar kecilnya P.B.B. yang harus dibayar.
- p). Terdapat korelasi antara faktor agama dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak (P.B.B.). Yang kurang nampak korelasinya adalah antara agama dengan besarnya pajak yang masuk.
- q). Dalam penelitian ini ada beberapa faktor (variabel) lain yang kurang diperhatikan sebelumnya (luas tanah dan bangunan serta kualitas tanah dan bangunan).

B. Kesimpulan Utama

- 1). Terdapat korelasi antara nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dengan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
- 2). Peranan pimpinan non formal dalam pembentukan nilai-nilai sosial cukup besar.
- 3). Faktor-faktor sanksi hukuman, agama, tauladan dari pimpinan, cukup berpengaruh terhadap terbentuknya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
- 4). Pemerintah telah melakukan aktivitas penyuluhan perpajakan, meskipun masih terbatas.
- 5). Terdapat korelasi antara agama dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak.
- 6). Pajak bermanfaat bagi masyarakat.
- 7). Partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak meningkat.